

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2023



KECAMATAN BULU
KABUPATEN REMBANG

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN COVER	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
KATA PENGANTAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan	2
1.3 Aspek Strategis Organisasi dan Permasalahan Utama	7
1.4 Landasan Hukum	7
1.5 Sistematika	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategis	9
2.2 Rencana Kinerja	12
2.3 Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	18
3.2 Realisasi Anggaran	42
BAB IVPENUTUP	
4.1 Kesimpulan	44
4.2 Rekomendasi	44
LAMPIRAN	
Perjanjian Kinerja	46
RKT / Lain-lain yang dianggap perlu	

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1	: Tujuan dan sasaran Pelayanan Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang Tahun 2021 – 2026.....	12
Tabel 2.2	: Tabel Perencanaan Kinerja	12
Tabel 2.3	: Tabel Indikator Kinerja Utama & Perjanjian Kinerja	12
Tabel 2.4	: Tabel Program dan Kegiatan	13
Tabel 3.1	: Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023	22
Tabel 3.2	: Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir ...	25
Tabel 3.3	: Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	28
Tabel 3.4	: Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan	31
Tabel 3.5	: Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	34
Tabel 3.6	: Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	37
Tabel 3.7	: Realisasi Anggaran	42

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Kantor Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Rembang, bahwa Kantor Kecamatan Bulu mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Disisi lain, laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Kantor Kecamatan Bulu melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2023, Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan Rencana Strategis 2021-2026 serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 yang telah ditetapkan.

Rembang, 22 Februari 2024
Camat Bulu



Mochamad Soleh SE MM

Pembina

NIP. 19700505 199003 1008

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, mengamanatkan Bupati untuk menyusun Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan Kinerja yang disusun secara periodik setiap akhir tahun anggaran tersebut menjadi media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu, laporan kinerja juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *Good Governance* atau dalam perspektif yang lebih luas bersungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Laporan kinerja yang disusun merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, serta bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, serta menjadi bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi. Dengan adanya Laporan Kinerja Kecamatan Bulu, dapat diketahui tingkat capaian kinerja suatu unit organisasi dan hal lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, terutama gambaran mengenai tingkat kesesuaian antara program dan kegiatan yang direncanakan dengan realisasinya. Laporan ini dapat juga digunakan sebagai acuan dalam menyusun rencana kinerja dan rencana anggaran di tahun mendatang.

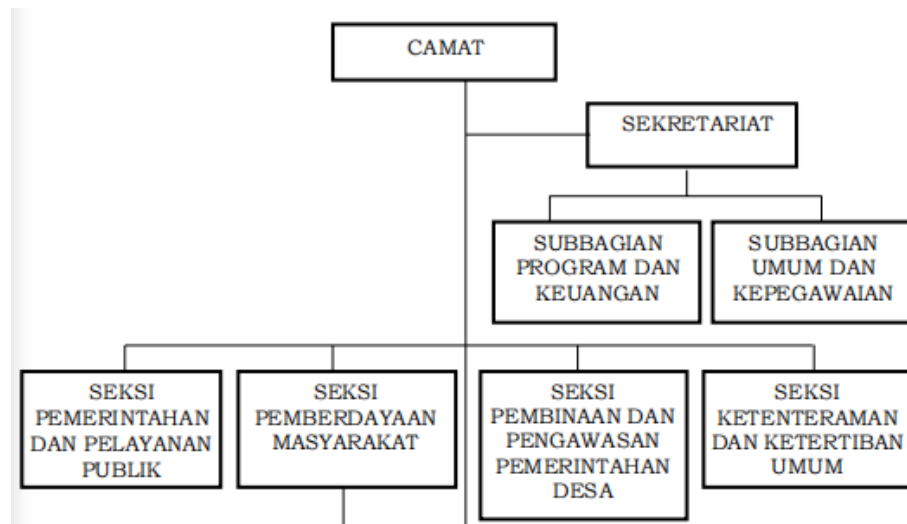
1.2 Kedudukan, Tugas Pokok & Fungsi Kecamatan

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan Bulu merupakan koordinator penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari:

- a. Camat
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Subbagian Program dan Keuangan;
 - 2) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;
- f. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;

Bagan Susunan Organisasi Kecamatan Bulu sebagai berikut:



Berdasarkan bagan tersebut dijelaskan tugas dan fungsi berikut:

1. Camat, mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

Dalam melaksanakan tugasnya, Camat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum;
- b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;

- d. pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
 - e. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
 - f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan ;
 - g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
 - h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah yang ada di kecamatan;
 - i. pelaksanaan fungsi kesekretariatan;
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati
2. Sekretariat, mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, produk hukum, keuangan, kerumahtanggaan, ken.asama, kearsipan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan.
- Dalam melaksanakan tugas Sekretariat Kecamatan menyelenggarakan fungsi :
- a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan Kecamatan;
 - b. pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan kecamatan;
 - c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, dan kearsipan di lingkungan kecamatan;
 - d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Kecamatan;
 - e. pengoordinasian penyusunan produk hukum di lingkungan kecamatan;
 - f. pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
 - g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan kecamatan;
 - h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
- 2.1 Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan:
- a. penyiapan bahan perumusan bidang perencanaan dan program kerja serta pengelolaan keuangan di lingkungan Kecamatan;

- b. pengoordinasian bidang perencanaan dan program kerja serta pengelolaan keuangan di lingkungan Kecamatan;
- c. pelaksanaan dan pemantauan bidang perencanaan dan program kerja serta pengelolaan keuangan di lingkungan Kecamatan;
- d. evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan dan program kerja serta pengelolaan keuangan di lingkungan Kecamatan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

2.2 Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan:

- a. penyiapan bahan perumusan pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, barang milik daerah, kearsipan, kepegawaian, barang milik daerah dan pelayanan administrasi perkantoran di lingkungan Kecamatan;
- b. pengoordinasian pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, barang milik daerah, kearsipan, kepegawaian, barang milik daerah dan pelayanan administrasi perkantoran di lingkungan Kecamatan;
- c. pelaksanaan dan pemantauan pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, barang milik daerah, kearsipan, kepegawaian, barang milik daerah dan pelayanan administrasi perkantoran di lingkungan Kecamatan;
- d. evaluasi dan pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, barang milik daerah, kearsipan, kepegawaian, barang milik daerah dan pelayanan administrasi perkantoran di lingkungan Kecamatan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:

- a. pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
- b. peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- c. fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah Kecamatan; peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan;

- d. pengoordinasian dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
 - e. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
 - f. pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha; pelaksanaan urusan pemerintahan non perizinan;
 - g. pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan;
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:
- a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa/Kelurahan;
 - b. sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
 - c. peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan;
 - d. fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Desa/Kelurahan;
 - e. fasilitasi penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan;
 - f. peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan;
 - g. fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana lembaga kemasyarakatan;
 - h. fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat;
 - i. fasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna;
 - j. pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati;
 - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
5. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:
- a. fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
 - b. fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
 - c. fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
 - d. fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
 - e. fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
 - f. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa;

- g. rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
 - h. fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan kawasan perdesaan;
 - i. fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
 - j. fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - k. fasilitasi kerjasama antardesa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga;
 - l. fasilitasi penataan pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
 - m. koordinasi pendampingan desa di wilayahnya;
 - n. koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan;
 - o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
6. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:
- a. koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - b. sinergitas dengan POLRI, TNI dan instansi vertikal di wilayah kecamatan;
 - c. harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
 - d. koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
 - e. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan UUD Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemerintahan dan pemeliharaan keutuhan NKRI;
 - f. fasilitasi koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
 - g. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 - h. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal regional dan nasional;
 - i. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang~undangan;
 - j. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
 - k. pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan;
 - l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

1.3 Aspek Strategis Organisasi & Permasalahan Utama

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Bulu adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan

Publik dan Pemberdayaan Masyarakat Desa serta melaksanakan tugas yang di limpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten, karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Pada Dokumen RPJMD Kabupaten Rembang tahun 2021-2026 terdapat 7 (tujuh) isu strategis yaitu :

- a. Perlunya Penguatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan;
- b. Kualitas Sumber Daya Manusia yang belum memiliki daya saing yang optimal serta pelayanan dasar yang masih memerlukan peningkatan;
- c. Belum optimalnya pengendalian tata ruang dan perlunya pemantaban penyediaan infrastruktur, serta rendahnya ketersediaan air baku;
- d. Perlunya penguatan inovasi dan daya saing nilai tambah produksi pada sektor perekonomian;
- e. Masih tingginya angka kemiskinan;
- f. Meningkatnya ancaman krisis akibat perubahan iklim dan penyakit menular wabah, epidemi, dan pandemi) dan;
- g. Perlunya penguatan kemandirian desa.

Dari ketujuh isu strategis tersebut yang terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Bulu adalah isu strategis pertama dan ketujuh yaitu “ **Perlunya Penguatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Perlunya Penguatan Kemandirian Desa**”.

Terdapat permasalahan/kendala atau isu-isu yang harus mendapatkan penanganan. Maka perumusan isu strategis di Kecamatan Bulu tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- 1) Perlunya peningkatan kualitas Pelayanan Publik;
- 2) Perlunya peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa

1.4 Landasan Hukum

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Pemerintah
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

1.5 Sistematika

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan
- 1.3 Aspek Strategis Organisasi dan Permasalahan Utama
- 1.4 Landasan Hukum
- 1.5 Sistematika

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- 2.1 Rencana Strategis
- 2.2 Rencana Kinerja
- 2.3 Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1 Capaian Kinerja Organisasi
- 3.2 Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

- 3.1 Kesimpulan
- 3.2 Rekomendasi

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

2.1.1 Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Visi juga dapat diartikan sebagai arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (*clarity of direction*) yang menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah.

Visi Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 merupakan gambaran pernyataan kondisi Kabupaten Rembang yang dicita-citakan pada tahun 2026. Upaya untuk mencapai kondisi tersebut dijabarkan dalam misi, tujuan dan sasaran yang terukur yang menggambarkan upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang dalam mewujudkan pencapaian visi tersebut. Misi selanjutnya dijabarkan lebih operasional kedalam tujuan dan sasaran yang disertai dengan indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian visi. Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan, dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka visi Kabupaten Rembang tahun 2021-2026 adalah: **“REMBANG GEMILANG 2026”**

Penjabaran visi tersebut sebagai berikut: **Rembang Gemilang** menggambarkan suatu semangat mewujudkan masyarakat Kabupaten Rembang yang sejahtera dari segi ekonomi, melalui pembangunan pertanian dan industri, serta rasa aman dan tentram dalam kehidupan bermasyarakat dengan proteksi jaminan sosial yang baik dan mendapatkan pelayanan birokrasi yang prima, pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan berkembangnya kehidupan demokrasi, dan saling tenggang rasa yang ditopang dengan pemberdayaan masyarakat desa yang lebih mandiri.

GEMILANG dapat dimaknai sebagai **GEMati**, **gampIL** dan **gamblANG**:

Gemati adalah terwujudnya Rembang yang ngopeni dan ngayomi warganya untuk mencapai terwujudnya masyarakat yang sehat, terdidik, memiliki kemampuan ekonomi memadai sehingga dapat mengembangkan kehidupan sosial dan spiritualnya.

Gampil adalah pembangunan kapasitas sumberdaya manusia dan penanganan secara optimal potensi sumber daya alam yang menempatkan prinsip gampil atau mudah diakses masyarakat.

Gamblang adalah terwujudnya tatanan birokrasi yang mampu mendukung peningkatan pelayanan dan kehidupan sosial yang didasari atas prinsip yang transparan, terukur dan akuntabel.

2.1.2 Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis internal dan eksternal. Rumusan misi ditetapkan sebagai berikut:

1. Mengembangkan profesionalisasi, modernisasi organisasi dan tata kerja birokrasi.

Pemerintah Kabupaten Rembang meningkatkan sumber daya aparatur yang profesional dan pelayanan prima melalui smart government yang terintegrasi untuk mewujudkan tata kelola dan tata pamong pemerintahan daerah yang efektif, efisien, komunikatif, dan terus melakukan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi dan adopsi teknologi yang terpadu.

2. Mengembangkan sumber daya manusia yang semakin berkualitas dan terproteksi dalam jaminan sosial.

Pemerintah Kabupaten Rembang berkomitmen memberikan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pelayanan pendidikan dan kesehatan yang bermutu, adil dan merata.

3. Membangun infrastruktur dan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan.

Pemerintah Kabupaten Rembang berkomitmen untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur secara sinergis dan terintegrasi dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai daya dukung lingkungan serta berwawasan lingkungan. Selain itu, mendorong kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan melalui pertumbuhan ekonomi yang berbasis pada sektor unggulan daerah, seperti, pertanian, perikanan, perdagangan dan pariwisata.

4. Mengembangkan Kemandirian Desa berbasis Potensi Lokal.

Pemerintah Kabupaten Rembang berkomitmen untuk mewujudkan peningkatan desa maju dan mandiri diantaranya melalui pengelolaan Keuangan Desa dan peningkatan Pendapatan Desa.

2.1.3 Tujuan dan sasaran

Kecamatan menjadi bagian dalam mencapai Misi I: “Mengembangkan Profesionalisasi, Modernisasi Organisasi dan Tata Kerja Birokrasi”. Dari Misi tersebut jika diturunkan lebih lanjut Kecamatan termasuk dalam upaya mencapai Tujuan “Terwujudnya Pemerintahan yang Baik dan Bersih” dengan indikator “Indeks Reformasi Birokrasi”. Sasaran dari tujuan tersebut dalam konteks Kecamatan adalah “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik” dengan indikator “Indeks Pelayanan Publik”. Selanjutnya untuk mendukung pencapaian Sasaran Daerah, pada Kecamatan telah ditetapkan sasaran beserta indikatornya yakni: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan dengan indikator

Indeks Kepuasan Masyarakat. Guna mendukung pencapaian Sasaran dan Indikator tersebut, maka Kecamatan memiliki program dan indikator yang telah ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Layanan Publik dengan indikator Capaian Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan ke Camat;
- 2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan indikator Persentase Dana Desa/Kelurahan untuk pemberdayaan masyarakat dan Jumlah desa dengan swadaya masyarakat \geq Rp 20.000.000,00;
- 3) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan indikator Persentase desa dengan tata kelola pemerintahan yang baik;
- 4) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan indikator Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- 5) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban dengan indikator Cakupan Penyelenggaraan Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026, adalah :

“ Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik”

Tujuan tersebut selaras dengan tujuan yang melekat dalam misi pertama RJPMD Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 yaitu mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih.

Tujuan sebagaimana tersebut berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bulu seperti yang tertuang dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan. Dalam hal ini Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang wajib menjadi koordinator yang mampu menyelenggarakan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan Bulu yang baik melalui pemberian pelayanan bagi masyarakat yang prima, mewujudkan keberdayaan masyarakat dan menjaga ketentraman dan ketertiban lingkungan sehingga Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Rembang dapat tercapai.

Selanjutnya untuk mendukung pencapaian sasaran daerah, pada Kecamatan telah ditetapkan sasaran beserta indikatornya yakni: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat. Adapun untuk mencapai tujuan tersebut Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang menetapkan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Kecamatan Bulu dalam rangka pencapaian tujuan Kecamatan Bulu selama tahun 2021-2026, dijabarkan sebagai berikut:

“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan”.

Tujuan dan sasaran Pelayanan Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang Tahun 2021 – 2026, dapat dijabarkan sebagaimana pada Tabel 2.1 sebagai berikut:

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indek kepuasan masyarakat	75	79	80	81	82

2.2 Perencanaan Kinerja

Menjabarkan dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam renstra, sesuai tabel 2.2 sebagai berikut:

No.	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik			Indeks Pelayanan Publik/IPP	angka	3.2
		1.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	angka	79

2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja (PK)

2.3.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, pada suatu kurun waktu tertentu, yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas, fungsi, dan mandat (*core business*) yang diembannya.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Bulu yang telah ditetapkan tahun 2021 – 2026 sebagai berikut:

Misi I : Mengembangkan Profesionalisasi, Modernisasi Organisasi dan Tata Kerja Birokrasi

Tujuan : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan

INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN		SUMBER DATA
		DASAR	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN	
Indek Pelayanan Publik	Angka	1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan	Nilai Indek = \sum (nilai aspek n x bobot aspek n)	Olahan data OPD

Indek Kepuasan Masyarakat	Angka	2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat untuk Penyelenggaraan Pelayanan Publik	IKM = Total dari nilai persepsi per unsur : total unsur yang terisi x nilai penimbang
---------------------------	-------	---	---

2.3.2 Perjanjian Kinerja (PK)

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja merupakan perwujudan komitmen dan kesepakatan atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia sehingga terjadi kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Adapun Perjanjian Kinerja Kecamatan Bulu Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
	Tujuan :		
	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik/IPP	3,2
	Sasaran :		
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79
	Sasaran Strategis		
1	Meningkatnya Nilai SAKIP OPD	Nilai SAKIP OPD	64
2	Meningkatnya Capaian Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Capaian Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	7 nilai
3	Meningkatnya Kontribusi Dana Desa/Kelurahan untuk Pemberdayaan Masyarakat	%Kontribusi Dana Desa/Kelurahan untuk Pemberdayaan Masyarakat	7 nilai
4	Meningkatnya Cakupan Penyelenggaraan Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum	7 nilai
5	Meningkatnya Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum	7 nilai
6	Meningkatnya Desa dengan Tata Kelola Pemerintahan baik	% Desa dengan Tata Kelola Pemerintahan Baik	7 nilai

Tabel 2.4 Program dan Kegiatan:

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD Kec. Bulu	64 angka	Rp1.807.506.842,-
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah	92,5%	Rp0,-
	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	<i>3 dok</i>	Rp0,-
	<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>5 lap</i>	Rp0,-
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik	100%	Rp1.588.078.992,-
	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>15 org/bl</i>	Rp1.565.158.992,-
	<i>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD</i>	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD</i>	<i>1 dok</i>	Rp22.920.000,-
	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	<i>1 dok</i>	Rp0,-
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Kepegawaian yang dikelola dengan baik	100%	Rp0,-
	<i>Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>	<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>	<i>1 dok</i>	Rp0,-
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum	100%	Rp44.164.860,-
	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	<i>1 paket</i>	Rp807.250,-
	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	<i>1 paket</i>	Rp969.200,-
	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	<i>1 paket</i>	Rp18.606.600,-
	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	<i>1 paket</i>	Rp6.327.090,-
	<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan</i>	<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang Disediakan</i>	<i>1 dok</i>	Rp840.000,-
	<i>Penyediaan Bahan/ Material</i>	<i>Jumlah Paket Bahan/ Material yang Disediakan</i>	<i>1 paket</i>	Rp11.102.100
	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	<i>1 lap</i>	Rp5.512.500,-
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercukupan Sarana Prasarana Aparatur	75%	Rp0,-

	<i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	<i>Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan</i>	85%	Rp0,-
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Rp151.790.000,-
	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	<i>12 lap</i>	<i>Rp110.000,-</i>
	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	<i>12 lap</i>	<i>Rp12.000.000,-</i>
	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	<i>12 lap</i>	<i>Rp139.680.000,-</i>
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dengan Kondisi Baik	93%	Rp22.655.460,-
	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	<i>15 unit</i>	<i>Rp8.321.000,-</i>
	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	<i>4 unit</i>	<i>Rp14.421.990,-</i>
	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	<i>10 unit</i>	<i>Rp730.000,-</i>
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Capaian urusan pemerintahan yang dilipahkan ke Camat	100%	Rp1.575.000,-
2.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	Rp1.575.000,-
	<i>Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	<i>2 lap</i>	<i>Rp1.575.000,-</i>
2.2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase penyelenggaraan penunjang kesejahteraan masyarakat yang ditangani	100%	Rp0,-
	<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</i>	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</i>	<i>16 lap</i>	<i>Rp0,-</i>
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kontribusi dana desa/ kelurahan untuk pemberdayaan masyarakat	100%	Rp39.446.050,-
		Jumlah desa dengan swadaya masyarakat \geq Rp. 20.000.000,-	6 desa	Rp0,-
3.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Penetapan APBDesa & Penyampaian SPJ tepat waktu dan Persentase	100%	Rp39.446.050,-

		Pelaksanaan Pembangunan Desa Secara Swakelola		
	<i>Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</i>	<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</i>	<i>16 lbg</i>	Rp27.999.690,-
	<i>Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	<i>10 lap</i>	Rp11.446.360,-
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum	100%	Rp12.900.000,-
4.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelesaian permasalahan Ketentaraman dan Ketertiban umum	100%	Rp12.900.000,-
	<i>Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>	<i>3 lap</i>	Rp12.900.000,-
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100%	Rp8.451.700,-
5.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	Rp8.451.700,-
	<i>Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia</i>	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia</i>	<i>130 orang</i>	Rp8.451.700,-
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa dengan tata kelola pemerintah baik	95%	Rp4.000.000,-
6.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rata-rata IKM Desa dan Persentase Pemerintahan Desa yang tertib administrasi	93.7%	Rp4.000.000,-
	<i>Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa</i>	<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa</i>	<i>1 dok</i>	Rp0,-
	<i>Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa</i>	<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan</i>	<i>1 dok</i>	Rp0,-

		<i>pendayagunaan asset desa</i>		
	<i>Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa</i>	<i>Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa</i>	<i>1 dok</i>	<i>Rp0,-</i>
	<i>Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif</i>	<i>Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka perencanaan pembangunan partisipatif</i>	<i>1 dok</i>	<i>Rp4.000.000,-</i>

BAB III **AKUNTABILITAS KINERJA**

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

3.1.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD

Proporsi Belanja OPD Kecamatan Bulu Tahun Anggaran 2023 untuk Belanja Operasi dan Belanja Modal masing-masing sebesar **Rp1.873.879.592,-** atau 100,00 % untuk Belanja Operasi dan **Rp0,-** untuk Belanja Modal.

Dan secara rinci proporsi Belanja Operasi sebesar **Rp1.873.879.592,-** yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar **Rp1.588.078.992,-** dan Belanja Barang dan Jasa sebesar **Rp285.800.600,-** sedangkan untuk Belanja Modal sebesar Rp. 0,- .

Anggaran induk Kecamatan Bulu pada Tahun 2023 sebesar **Rp2.247.986.100,-** dan APBDP Kecamatan Bulu Tahun Anggaran 2023 sebesar **Rp1.873.879.592,-** dengan realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar **Rp1.793.654.994,-** atau sebesar 95,72% dengan sisa anggaran adalah sebesar **Rp80.224.598,-** atau 4,28%.

Sisa anggaran Belanja Operasi terdiri dari:

- Belanja Pegawai sebesar **Rp1.588.078.992,-** terealisasi sebesar **Rp1.521.596.551,-** atau 95,81% dengan sisa anggaran sebesar **Rp66.482.441,-** atau 4,19%.
- Belanja Barang dan Jasa sebesar **Rp285.800.600,-** terealisasi sebesar **Rp272.058.443,-** atau 95,19% dengan sisa anggaran belanja **Rp13.742.157,-** atau 4,81%.

Sisa Anggaran Belanja yang tidak terserap secara optimal disebabkan oleh beberapa hal, antara lain:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah:

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah jumlah anggaran yang ditetapkan pada DPA induk Tahun 2023 sebesar Rp15.000.000,- dan pada APBDP menjadi Rp0,-.
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah jumlah anggaran pada DPA induk Tahun 2023 sebesar Rp5.000.000,- namun di refocusing pada APBDP menjadi Rp0,-.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah:

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN pada DPA Induk Tahun 2023 jumlah anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.612.224.100,- dan pada APBDP mengalami penurunan menjadi Rp1.565.158.982,- terealisasi Rp1.498.676.551,- atau 95,81% dengan sisa sebesar Rp80.224.598,- atau 4,19%.

Sisa tersebut terjadi setelah dilaksanakan secara maksimal sesuai kebutuhan 1 (satu) Tahun Anggaran.

- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan jumlah anggaran induk sebesar Rp68.850.000,-, namun pada APBDP diubah menjadi Rp22.920.000,- terealisasi sebesar Rp22.920.000,- atau 100,00%.
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD pada anggaran induk ditetapkan sebesar Rp5.000.000,- namun pada APBDP diubah menjadi Rp0,-.

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah:
 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian pada DPA induk Tahun 2023 sebesar Rp 8.000.000,- dan mengalami refocusing menjadi Rp0,-.
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah:
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang ditetapkan sebesar Rp2.000.000,- diubah pada APBDP menjadi Rp 807.250,- terealisasi sebesar Rp807.250,- atau 100,00
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,- dilakukan perubahan menjadi Rp969.200,- terealisasi sebesar Rp969.200,- atau 100,00%.
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang ditetapkan sebesar Rp38.300.000,- namun pada APBDP menjadi Rp18.606.600,- terealisasi sebesar Rp18.406.600,- atau 98,92%, sisa sebesar Rp200.000,- atau 1,08 %. Sisa tersebut terjadi setelah dilaksanakan secara maksimal sesuai kebutuhan.
 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan pada APBD induk ditetapkan sebesar Rp7.000.000,- dan pada APBDP diubah menjadi Rp6.327.210,- terealisasi sebesar Rp6.327.090,- atau 99,99 % sisa sebesar Rp120,- atau 0,01 %. Sisa tersebut terjadi setelah dilaksanakan secara maksimal sesuai kebutuhan.
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan ditetapkan sebesar Rp2.00.000,- namun pada APBDP menjadi Rp840.000,- terealisasi sebesar Rp840.000,- atau 100%.
 - Penyediaan Bahan/Material pada APBD Induk ditetapkan sebesar Rp15.000.000,-, namun pada APBDP menjadi Rp11.102.100,- dan terealisasi sebesar Rp. 11.102 100,- atau 100,00%.
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD dari yang ditetapkan pada APBD Induk sebesar Rp17.000.000,- dilakukan perubahan menjadi Rp5.512.500,- terealisasi sebesar Rp5.512.500,- atau 100,00%.
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat pada APBD Induk dianggarkan sebesar Rp2.000.000,- namun diubah menjadi Rp110.000,- terrealisasi Rp110.000,- atau 100,00%.
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dari yang ditetapkan sebesar Rp12.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 9.089.868,- atau 75,74 % dengan sisa anggaran sebesar Rp2.910.132,- atau 24,26%. Sisa tersebut terjadi setelah kebutuhan langganan Air dan langganan Listrik tercukupi selama 12 bulan.
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan APBD Induk sebesar Rp151.560.000,- kemudian diubah menjadi Rp139.680.000,- terealisasi sebesar Rp137.365.625,- atau 98,34% sisa sebesar Rp2.314.375,- atau 1,66%. Sisa tersebut terjadi setelah kebutuhan selama 1 Tahun Anggaran tercukupi.
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan jumlah APBD induk sebesar Rp20.000.000,- namun pada APBDP menjadi Rp8.321.000,- terealisasi sebesar Rp7.510.470,- atau 90,26% dengan

sisa anggaran sebesar Rp810.530,- atau 9,74%. Sisa tersebut terjadi setelah dilaksanakan secara maksimal sesuai kebutuhan.

- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya ditetapkan APBD induk sebesar Rp20.500.000,- namun diubah menjadi Rp14.421.990,- terealisasi sebesar Rp14.421.990,- atau 100,00 %.
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya ditetapkan sebesar Rp4.000.000,- dan berubah menjadi Rp730.000,- terealisasi sebesar Rp723.000,- atau 99,04%, sisa sebesar Rp7.000,- atau 0,96%.
- b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan pada APBD induk dianggarkan sebesar Rp10.800.000,- namun diubah menjadi Rp1.575.000,- dan terealisasi Rp1.575.000,- atau 100,00%.
 2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan ditetapkan anggaran sebesar Rp18.500.000,- namun pada APBDP anggaran tersebut difocusing menjadi Rp0,-.
- c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan:
1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa:
 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa dianggarkan sebesar Rp28.000.000,- dan pada APBDP menjadi Rp27.999.690,- terealisasi sebesar Rp27.999.690,- atau 100,00%.
 - Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan ditetapkan sebesar Rp60.000.000,- namun difocusing menjadi Rp11.446.360,- terealisasi sebesar Rp11.446.360,- atau 100,00%.
- d. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum:
1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum:
 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan ditetapkan anggaran sebesar Rp41.800.000,- dan diubah menjadi Rp12.900.000,- terealisasi sebesar Rp5.400.000,- atau 41,86% sisa anggaran Rp7.500.000,- atau 58,14%. Hal tersebut terjadi karena pada proses pencairan tidak tersedianya dana dalam RKUD Pemkab Rembang.
- e. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum:
1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah:
 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara ditetapkan sebesar Rp37.452.000,- namun pada APBDP menjadi Rp8.451.700,- dengan realisasi sebesar Rp8.451.700,- atau 100,00%.

- f. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Penegawasan Pemerintahan Desa
 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa pada APBD induk dianggarkan Rp 4.500.000,- namun diubah menjadi Rp0,-.
 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa dianggarkan sebesar Rp26.200.000,- namun difocusing menjadi Rp0,-.
 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa semula dianggarkan Rp5.300.000,- namun pada APBDP menjadi Rp0,-.
 - Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif pada APBD induk dianggarkan Rp5.000.000,- dan pada APBDP menjadi Rp4.000.000,- terealisasi Rp4.000.000,- atau 100,00%.

4 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Meskipun secara keseluruhan Realisasi Anggaran Belanja Daerah Kantor Kecamatan Bulu pada Tahun 2023 tidak mencapai target secara maksimal dikarenakan adanya refocusing anggaran pada tahun tersebut. Hal ini menyebabkan perubahan target pada reja perubahan tahun 2023.

Namun demikian perlu kami sampaikan bahwa hal yang dapat mempengaruhi dalam pencapaian kinerja pengelolaan Keuangan maupun kinerja pencapaian target Program/Kegiatan adalah keterbatasan kemampuan APBD Kabupaten Rembang khususnya untuk OPD Kecamatan Bulu yang pada akhirnya dapat mempengaruhi pencapaian target yang telah ditetapkan. Walaupun demikian OPD Kecamatan Bulu telah berusaha semaksimal mungkin dengan adanya hambatan dan keterbatasan tersebut.

Adapun beberapa permasalahan yang dapat mempengaruhi pencapaian kinerja pengelolaan keuangan dan kinerja pencapaian target Program dan Kegiatan pada tahun anggaran 2023 antara lain :

1. Adanya refocusing anggaran yang memangkas sejumlah pagu anggaran.
2. Belum adanya koordinasi secara maksimal beberapa kegiatan yang menjadi prioritas dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Daerah.
2. Perencanaan Anggaran yang berbasis kinerja yang belum sempurna karena keterbatasan kemampuan APBD Kabupaten Rembang.
3. Belum optimalnya koordinasi intern OPD dalam melaksanakan tahapan Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan dan Pelaporan sehingga berpengaruh terhadap pencapaian target kinerja dari Program dan Kegiatan yang telah ditentukan.

Dalam pencapaian Target Kinerja Keuangan Tahun Anggaran 2023 seperti yang diuraikan diatas secara keseluruhan dari 6 (enam) Program dan 13 (tigabelas) kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan Bulu bersumber dari APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2023 (setelah Perubahan) sebesar **Rp1.873.879.592,-** (satu milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh Sembilan ribu lima ratus Sembilan puluh dua rupiah) dan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 Anggaran tersebut terealisasi sebesar **Rp1.793.654.994,-** (satu milyar tujuh ratus Sembilan puluh tiga juta enam ratus lima puluh empat ribu Sembilan ratus Sembilan puluh empat rupiah) atau dalam persentase sebesar **95,72%**.

Skala nilai peringkat kinerja Kecamatan Bulu Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Sangat Baik : >100%;
- b. Baik : 85 – 100%;**
- c. Cukup : 65 – 84,99%;
- d. Kurang : 50 - 64,99%;
- e. Sangat Kurang : < 50, %

Pada sub bab ini disajikan kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023;

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD Kec. Bulu	64 angka	65,21 angka	101,89	B	
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah	92,5%	92,5%	100,00	B	
	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	<i>2 dok</i>	2 dok	100,00	B	
	<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>4 lap</i>	4 lap	100,00	B	
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik	100%	100%	100,00	B	
	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>15 org/ bl</i>	15 org/ bl	100,00	B	
	<i>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD</i>	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD</i>	<i>1 dok</i>	1 dok	100,00	B	
	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	<i>1 dok</i>	1 dok	100,00	B	
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Kepegawaian yang dikelola dengan baik	100%	100%	100,00	B	
	<i>Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>	<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>	<i>1 dok</i>	1 dok	100,00	B	
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum	100%	100%	100,00	B	
	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	<i>1 paket</i>	1 paket	100,00	B	
	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	<i>1 paket</i>	1 paket	100,00	B	
	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	<i>1 paket</i>	1 paket	100,00	B	
	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	<i>1 paket</i>	1 paket	100,00	B	

	<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	<i>1 dok</i>	<i>1 dok</i>	100,00	B	
	<i>Penyediaan Bahan/Material</i>	<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>	<i>1 paket</i>	<i>1 paket</i>	100,00	B	
	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	<i>1 lap</i>	<i>1 lap</i>	100,00	B	
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercukupan Sarana Prasarana Aparatur	85%	85%	100,00	B	
	<i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0,00	E	
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100,00	B	
	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	<i>12 lap</i>	<i>12 lap</i>	100,00	B	
	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	<i>12 lap</i>	<i>12 lap</i>	100,00	B	
	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	<i>12 lap</i>	<i>12 lap</i>	100,00	B	
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dengan Kondidi Baik	93%	93%	100,00	B	
	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	<i>15 unit</i>	<i>15 unit</i>	100,00	B	
	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi</i>	<i>4 unit</i>	<i>4 unit</i>	100,00	B	
	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi</i>	<i>10 unit</i>	<i>10 unit</i>	100,00	B	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Capaian urusan pemerintahan yang dilipihkan ke Camat	100%	100%	100,00	B	
2.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	100%	100,00	B	
	<i>Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	<i>2 lap</i>	<i>2 lap</i>	100,00	B	
2.2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase penyelenggaraan penunjang kesejahteraan masyarakat yang ditangani	100%	100%	100,00	B	

	<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</i>	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</i>	16 lembaga	16 lembaga	100,00	B	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kontribusi dana desa/ kelurahan untuk pemberdayaan masyarakat	100%	100%	100,00	B	
		Jumlah desa dengan swadaya masyarakat \geq Rp. 20.000.000,-	6 desa	6 desa	100,00	B	
3.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Penetapan APBDesa & Penyampaian SPJ tepat waktu dan Persentase Pelaksanaan Pembangunan Desa Secara Swakelola	100%	100%	100,00	B	
	<i>Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</i>	<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</i>	16 lap	16 lap	100,00	B	
	<i>Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	10 lap	10 lap	100,00	B	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum	100%	100%	100,00	B	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelesaian permasalahan Ketentraman dan Ketertiban umum	100%	100%	100,00	B	
	<i>Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>	3 lap	3 lap	100,00	B	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100%	100%	100,00	B	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	100,00	B	
	<i>Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia</i>	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia</i>	130 orang	130 orang	100,00	B	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa dengan tata kelola pemerintah baik	95%	90%	94,74	B	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rata-rata IKM Desa dan persentase pemerintahan desa yang tertib administrasi	93,7%	79,48%	84,82	B	

	<i>Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa</i>	<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa</i>	<i>1 dok</i>	<i>1 dok</i>	100,00	B	
	<i>Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa</i>	<i>Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa</i>	<i>1 dok</i>	<i>1 dok</i>	100,00	B	
	<i>Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa</i>	<i>Jumlah Dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa</i>	<i>1 dok</i>	<i>1 dok</i>	100,00	B	
	<i>Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif</i>	<i>Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka perencanaan pembangunan partisipatif</i>	<i>1 dok</i>	<i>1 dok</i>	100,00	B	

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir (minimal 3 tahun);

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	202n-2			202n-1			202n		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai SAKIP OPD Kec. Bulu		61		61,5	61,51	100,02	64 angka	65,21 angka	101,89
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah		100		90	90	100,00	92,5%	92,5%	100,00
	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>		2		2	2	100,00	2 dok	2 dok	100,00
	<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>		7		7	7	100,00	4 lap	4 lap	100,00
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik		100		100	100	100,00	100%	100%	100,00
	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>		16		16	192	100,00	15 org	15 org	100,00
	<i>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>		12		12	12	100,00	1 dok	1 dok	100,00
	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>		1		1	1	100,00	1 lap	1 lap	100,00
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	% dokumen kepegawaian yang dikelola dengan baik		-		100	-	-	100%	100%	100,00
	<i>Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>	<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>		-		100	-	-	1 dok	1 dok	100,00
	<i>Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</i>	<i>Jumlah Dokumen Manajemen Kepegawaian yang dikelola dengan baik</i>		-		100	-	-	100%	100%	100,00
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum		100		100	100	100,00	100%	100%	100,00
	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>		12		12	12	100,00	1 paket	1 paket	100,00
	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>		12		12	12	100,00	1 paket	1 paket	100,00
	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>		12		12	12	100,00	1 paket	1 paket	100,00
	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>		12		12	12	100,00	1 paket	1 paket	100,00

	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		12		12	12	100,00	1 paket	1 paket	100,00
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		12		12	12	100,00	1 paket	1 paket	100,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12		12	9	75,00	1 paket	1 paket	100,00
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercukupan Sarana Prasarana Aparatur Daerah		100				-	75%	85%	113,33
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Dokumen Pewngelolaan BMD yang dikelola dengan baik		1		100		-	-	-	-
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan		-		-	-	-	-	-	-
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran		100		100	100	100,00	100%	100%	100,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12		12	12	100,00	12 Lap	12 Lap	100,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12		12	12	100,00	12 Lap	12 Lap	100,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12		12	12	100,00	12 Lap	12 Lap	100,00
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dengan Kondidi Baik		100		93	93	100,00	93%	93%	100,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya		14		14	14	100,00	15 unit	15 unit	100,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		3		3	3	100,00	4 unit	4 unit	100,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		8		8	8	100,00	10 unit	10 unit	100,00
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Capaian urusan pemerintahan yang dilipahkan ke Camat		100		95	95	100,00	100%	100%	100,00
2.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Kegiatn Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100				-	100%	100%	100,00
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		12		12		-	2 Lap	2 Lap	100,00
2.2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase penyelenggaraan penunjang kesejahteraan masyarakat yang ditangani		100		100	100	100,00	100%	100%	100,00
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		12		12	12	100,00	16 Lap	16 Lap	100,00
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kontribusi dana desa/ kelurahan untuk pemberdayaan masyarkat		100		100	100	100,00	100%	100%	100,00
		Jumlah desa dengan swadaya masyarakat ≥ Rp. 20.000.000,-		16		16		-	6 desa	6 desa	100,00
3.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Penetapan APBDesa & Penyampaian SPJ tepat waktu dan Persentase Pelaksanaan Pembangunan Desa Secara Swakelola		100		100		-	100%	100%	100,00

	<i>Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</i>	<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</i>							16 lem baga	16 lem baga	100,00
	<i>Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>		6		6	6	100,00	10 Lap	10 Lap	100,00
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum		100		100	100	100,00	100%	100%	100,00
4.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelesaian permasalahan Ketenteraman dan Ketertiban umum		100		100	100	100,00	100%	100%	100,00
	<i>Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>		12		12	12	100,00	3 Lap	3 Lap	100,00
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum		100		100	-	100,00	100%	100%	100,00
5.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		100		100	-	100,00	100%	100%	100,00
	<i>Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia</i>	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia</i>		80		80	80	100,00	130 org	130 org	100,00
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa dengan tata kelola pemerintah baik		100		95	95	100,00	95%	90%	94,74
6.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rata-rata IKM Desa		100		94	94	100,00	93,7%	79,48%	84,82
	<i>Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa</i>	<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa</i>		2		2	2	100,00	1 Dok	1 Dok	100,00
	<i>Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa</i>	<i>Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa</i>		1		1	1	100,00	-	-	-
	<i>Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa</i>	<i>Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa</i>							1 Dok	1 Dok	100,00
	<i>Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa</i>	<i>Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa</i>							1 Dok	1 Dok	100,00
	<i>Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif</i>	<i>Jumlah Dokumen fasilitasi dalam rangka perencanaan pembangunan partisipatif</i>							1 Dok	1 Dok	100,00

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2021	Target Akhir 2024	Tingkat Kemajuan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD Kec. Bulu	61	66	5
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100	100	0
	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	2	2	0
	<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	7	7	0
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik	100	100	0
	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	16	15	(1)
	<i>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	12	12	0
	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	4	1	(3)
	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD</i>	<i>Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan dengan kualitas baik</i>	-	-	-
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	% pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	-	-	-
	<i>Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>	<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>	-	-	-
	<i>Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</i>	<i>Jumlah Dokumen Manajemen Kepegawaian yang dikelola dengan baik</i>	-	-	-
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum	100	100	0
	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	12	12	0
	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	12	12	0
	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	12	12	0
	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	12	12	0
	<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan</i>	12	12	0
	<i>Penyediaan Bahan/Material</i>	<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>	12	12	0
	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	12	12	0
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercukupan Sarana Prasarana Aparatur	100	100	0
	<i>Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang disediakan</i>	1	2	1
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	100	0

	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	12	12	0
	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12	12	0
	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12	12	0
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dengan Kondisi Baik	100	93	(7)
	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>	14	14	0
	<i>Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi</i>	3	3	0
	<i>Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi</i>	8	8	0
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Capaian urusan pemerintahan yang dilipihkan ke Camat	100	98	(2)
2.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100	100	0
	<i>Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	12	12	0
2.2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase penyelenggaraan penunjang kesejahteraan masyarakat yang ditangani	100	96	(4)
	<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</i>	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</i>	12	12	0
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kontribusi dana desa/ kelurahan untuk pemberdayaan masyarakat	100	100	0
		Jumlah desa dengan swadaya masyarakat \geq Rp. 20.000.000,-	16	16	0
3.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Penetapan APBDesa & Penyampaian SPJ tepat waktu dan Persentase Pelaksanaan Pembangunan Desa Secara Swakelola	100	100	0
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	0	16	16
	<i>Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	6	6	0
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum	100	100	0
4.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelesaian permasalahan Ketentraman dan Ketertiban umum	100	100	0
	<i>Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>	12	12	0
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100	100	0
5.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	100	0

	<i>Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia</i>	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia</i>	80	100	20
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa dengan tata kelola pemerintah baik	100	96	(4)
6.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rata-rata IKM Desa	100	95	(5)
	<i>Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa</i>	<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa</i>	2	2	0
	<i>Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa</i>	<i>Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa</i>	1	0	0
	<i>Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa</i>	<i>Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa</i>	0	1	1
	<i>Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa</i>	<i>Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa</i>	0	1	1
	<i>Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif</i>	<i>Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka perencanaan pembangunan partisipatif</i>	0	16	16

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD Kec. Bulu	64 angka	65,21 angka	101,89%	Peningkatan kompetensi ASN sangat dibutuhkan	Evaluasi ulang
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah	92,5%	92,5%	100,00	Dilaksanakan sesuai ketentuan	Evaluasi ulang
	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	2 dok	2 dok	100,00	Dilaksanakan sesuai ketentuan	Evaluasi ulang
	<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	4 lap	4 lap	100,00	Dilaksanakan sesuai ketentuan	Evaluasi ulang
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik	100%	100%	100,00	Dilaksanakan sesuai ketentuan	Evaluasi ulang
	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	15 org	15 org	100,00	Dilaksanakan sesuai ketentuan	Evaluasi ulang
	<i>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	1 dok	1 dok	100,00	Dilaksanakan sesuai ketentuan	Evaluasi ulang
	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	1 lap	1 lap	100,00	Dilaksanakan sesuai ketentuan	Evaluasi ulang
	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>	<i>Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan dengan kualitas baik</i>	-	-	-	tidak dianggarkan	Evaluasi ulang
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Kepegawaian yang Dikelola dengan baik	100%	100%	100,00	Dilaksanakan sesuai ketentuan	Evaluasi ulang
	<i>Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>	<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>	1 dok	1 dok	100,00	Dilaksanakan sesuai ketentuan	Evaluasi ulang
	<i>Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</i>	<i>Jumlah Dokumen Manajemen Kepegawaian yang dikelola dengan baik</i>	-	-	-	tidak dianggarkan	Evaluasi ulang
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum	100%	100%	100,00	Refocusing anggaran	Evaluasi ulang
	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	1 paket	1 paket	100,00	Refocusing anggaran	Evaluasi ulang
	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	1 paket	1 paket	100,00	Refocusing anggaran	Evaluasi ulang
	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	1 paket	1 paket	100,00	Refocusing anggaran	Evaluasi ulang
	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	1 paket	1 paket	100,00	Refocusing anggaran	Evaluasi ulang
	<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Perundang-undangan</i>	<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	1 paket	1 paket	100,00	Refocusing anggaran	Evaluasi ulang

	<i>Penyediaan Bahan/Material</i>	<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>	<i>1 paket</i>	<i>1 paket</i>	100,00	Refocusing anggaran	Evaluasi ulang
	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	<i>1 paket</i>	<i>1 paket</i>	100,00	Refocusing anggaran	Evaluasi ulang
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercukupan Sarana Prasarana Aparatur	75	85	113,33	Tidak dianggarkan	Evaluasi ulang
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100,00	sesuai kebutuhan	Evaluasi ulang
	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	<i>12 Lap</i>	<i>12 Lap</i>	100,00	sesuai kebutuhan	Evaluasi ulang
	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	<i>12 Lap</i>	<i>12 Lap</i>	100,00	sesuai kebutuhan	Evaluasi ulang
	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	<i>12 Lap</i>	<i>12 Lap</i>	100,00	sesuai kebutuhan	Evaluasi ulang
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dengan Kondisi Baik	93%	93%	100,00		Evaluasi ulang
	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>	<i>15 unit</i>	<i>15 unit</i>	100,00	sesuai kebutuhan	Evaluasi ulang
	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	<i>4 unit</i>	<i>4 unit</i>	100,00	sesuai kebutuhan	Evaluasi ulang
	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	<i>10 unit</i>	<i>10 unit</i>	100,00	sesuai kebutuhan	Evaluasi ulang
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Capaian urusan pemerintahan yang dilipihkan ke Camat	100%	100%	100,00	Refocusing anggaran	Evaluasi ulang
2.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	100%	100,00	Refocusing anggaran	Evaluasi ulang
	<i>Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	<i>2 Lap</i>	<i>2 Lap</i>	100,00	Refocusing anggaran	Evaluasi ulang
2.2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase penyelenggaraan penunjang kesejahteraan masyarakat yang ditangani	100%	100%	100,00	Refocusing anggaran	Evaluasi ulang
	<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</i>	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</i>	<i>16 Lap</i>	<i>16 Lap</i>	100,00	Refocusing anggaran	Evaluasi ulang
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kontribusi dana desa/ kelurahan untuk pemberdayaan masyarakat	100%	100%	100,00	sesuai kebutuhan	Evaluasi ulang
		Jumlah desa dengan swadaya masyarakat \geq Rp. 20.000.000,-	6 desa	6 desa	100,00	sesuai kebutuhan	Evaluasi ulang
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Penetapan APBDesa & Penyampaian SPJ tepat waktu dan Persentase Pelaksanaan Pembangunan Desa Secara Swakelola	100%	100%	100,00	sesuai kebutuhan	Evaluasi ulang

	<i>Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</i>	<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</i>	16 lembaga	16 lembaga	100,00	sesuai kebutuhan	Evaluasi ulang
	<i>Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	10 Lap	10 Lap	100,00	sesuai kebutuhan	Evaluasi ulang
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum	100%	100%	100,00	Refocusing anggaran	Evaluasi ulang
4.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelesaian permasalahan Ketentraman dan Ketertiban umum	100%	100%	100,00	Refocusing anggaran	Evaluasi ulang
	<i>Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>	130 org	130 org	100,00	Refocusing anggaran	Evaluasi ulang
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100%	100%	100,00	Refocusing anggaran	Evaluasi ulang
5.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	100,00	Refocusing anggaran	Evaluasi ulang
	<i>Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia</i>	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia</i>	130 org	130 org	100,00	Refocusing anggaran	Evaluasi ulang
6.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa dengan tata kelola pemerintah baik	95%	90%	94,74	Refocusing anggaran	Evaluasi ulang
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rata-rata IKM Desa	93,7%	79,48%	84,82	Refocusing anggaran	Evaluasi ulang
	<i>Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa</i>	<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa</i>	1 Dok	1 Dok	100,00	Refocusing anggaran	Evaluasi ulang
	<i>Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa</i>	<i>Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa</i>	1 Dok	1 Dok	100,00	Refocusing anggaran	Evaluasi ulang
	<i>Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa</i>	<i>Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa</i>	1 Dok	1 Dok	100,00	Refocusing anggaran	Evaluasi ulang
	<i>Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif</i>	<i>Jumlah Dokumen fasilitasi dalam rangka perencanaan pembangunan partisipatif</i>	1 Dok	1 Dok	100,00	Refocusing anggaran	Evaluasi ulang

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

Memuat analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah

NO	Tujuan/ Sasaran	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	64	65.21	101.89	1,807,506,842	1,734,782,244	95.98	4
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	92.5	100	108.11	-	-	0	0
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	100.00	-	-	0	0
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	4	100.00	-	-	0	0
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	100	100.00	1,588,078,992	1,521,596,551	95.81	4
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15	15	100.00	1,565,158,992	1,498,676,551	95.75	4
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	1	100.00	22,920,000	22,920,000	100.00	0
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	100.00	-	0	0	0
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100.00	100	100.00	-	-	0	0
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	1	100.00	-	0	0	0
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	100.00	44,164,860	43,964,740	99.55	0
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	1	100.00	807,250	807,250	100.00	0
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	1	100.00	969,200	969,200	100.00	0
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1	1	100.00	18,606,600	18,406,600	98.93	1
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1	1	100.00	6,327,210	6,327,090	100.00	0

	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1	1	100.00	840,000	840,000	100.00	0
	Penyediaan Bahan/Material	1	1	100.00	11,102,100	11,102,100	100.00	0
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	1	100.00	5,512,500	5,512,500	100.00	0
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	75.00	85	113.33	-	-	0	0
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0	0	-	-	0	0
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100.00	151,790,000	146,565,493	96.56	3
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	100.00	110,000	110,000	100.00	0
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	12	100.00	12,000,000	9,089,868	75.75	24
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	12	100.00	139,680,000	137,365,625	98.34	1
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	93	93	100.00	23,472,990	22,655,460	96.52	3
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	15	15	100.00	8,321,000	7,510,470	90.26	10
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4	4	100.00	14,421,990	14,421,990	100.00	0
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10	10	100.00	730,000	723,000	99.04	1
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100	100	100.00	1,575,000	1,575,000	100.00	0
2.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100	100	100.00	1,575,000	1,575,000	100.00	0
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2	2	100.00	1,575,000	1,575,000	100.00	0
2.2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100	100	100.00	-	-	0	0
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	16	16	100.00	-	0	0	0
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	6	6	100.00	39,446,050	39,446,050	100.00	0
		100	100	100.00				0
3.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100	100	100.00	39,446,050	39,446,050	100.00	0

	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	16	16	100.00	27,999,690	27,999,690	100.00	0
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10	10	100.00	11,446,360	11,446,360	100.00	0
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100.00	100	100.00	12,900,000	5,400,000	41.86	58
4.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100.00	100	100.00	12,900,000	5,400,000	41.86	58
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3	3	100.00	12,900,000	5,400,000	41.86	58
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100	100	100.00	8,451,700	8,451,700	100.00	0
5.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100	100	100.00	8,451,700	8,451,700	100.00	0
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	130	130	100.00	8,451,700	8,451,700	100.00	0
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	95	90	94.74	4,000,000	4,000,000	100.00	0
6.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	93.7	79.48	84.82	4,000,000	4,000,000	100.00	0
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1	1	100.00	-	-	0	0
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1	1	100.00	-	-	0	0
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1	1	100.00	-	-	0	0

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak menunjang
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik/IPP	3,2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD Kec. Bulu	102	M
1.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,75	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100	M
				<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	100	M
				<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	100	M
1.2				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik	100	M
				<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	100	M
				<i>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD</i>	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD</i>	100	M
				<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	100	M
1.3				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Kepegawaian yang dikelola dengan baik	100	M
				<i>Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>	<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>	100	M
1.4				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum	100	M
				<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	100	M

				<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	100	M
				<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	100	M
				<i>Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan</i>	<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Peggandaan yang Disediakan</i>	100	M
				<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	100	M
				<i>Penyediaan Bahan/Material</i>	<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>	100	M
				<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	100	M
1.5				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercukupan Sarana Prasarana Aparatur	0	M
1.6				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	M
				<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	100	M
				<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	100	M
				<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	100	M
1.7				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dengan Kondidi Baik	100	M
				<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	100	M
				<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	100	M

				<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi</i>	100	M
2				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Capaian urusan pemerintahan yang dilipahkan ke Camat	100	M
2.1				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100	M
				<i>Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	100	M
2.2				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase penyelenggaraan penunjang kesejahteraan masyarakat yang ditangani	100	M
				<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</i>	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</i>	100	M
3				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kontribusi dana desa/ kelurahan untuk pemberdayaan masyarakat	100	M
					Jumlah desa dengan swadaya masyarakat \geq Rp. 20.000.000,-	100	M
3.1				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Penetapan APBDesa & Penyampaian SPJ tepat waktu dan Persentase Pelaksanaan Pembangunan Desa Secara Swakelola	100	M
				<i>Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	100	M
4				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum	100	M

4.1				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelesaian permasalahan Ketentaraman dan Ketertiban umum	100	M
				<i>Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>	100	M
5				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100	
5.1				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	M
				<i>Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia</i>	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia</i>	100	M
6				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa dengan tata kelola pemerintah baik	94,74	
6.1				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rata-rata IKM Desa	84,82	M
				<i>Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa</i>	<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa</i>	100	M
				<i>Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa</i>	<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa</i>	100,00	M

				<i>Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa</i>	<i>Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa</i>	100	M
				<i>Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif</i>	<i>Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif</i>	100	M

3.1 REALISASI ANGGARAN

Menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja.

No.	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1,873,879,592	1,793,654,994	95.98%
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1,807,506,842	1,734,782,244	0%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	0%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	0%
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	95.81%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,588,078,992	1,521,596,551	95.75%
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1,565,158,992	1,498,676,551	100.00%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	22,920,000	22,920,000	0%
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	0%
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	-	0%
	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	-	0%
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	99.55%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	44,164,860	43,964,740	100.00%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	807,250	807,250	100.00%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	969,200	969,200	98.93%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18,606,600	18,406,600	100.00%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6,327,210	6,327,090	100.00%
	Penyediaan Bahan/Material	840,000	840,000	100.00%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11,102,100	11,102,100	100.00%
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5,512,500	5,512,500	96.56%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	151,790,000	146,565,493	100.00%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	110,000	110,000	75.75%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12,000,000	9,089,868	98.34%
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	139,680,000	137,365,625	96.52%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	23,472,990	22,655,460	90.26%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	8,321,000	7,510,470	100.00%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14,421,990	14,421,990	99.04%

2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	730,000	723,000	100.00%
2.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	1,575,000	1,575,000	100.00%
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1,575,000	1,575,000	100.00%
2.2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1,575,000	1,575,000	0%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	-	-	0%
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	39,446,050	39,446,050	100.00%
3.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			100.00%
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	39,446,050	39,446,050	100.00%
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	27,999,690	27,999,690	100.00%
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	11,446,360	11,446,360	41.86%
4.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12,900,000	5,400,000	41.86%
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12,900,000	5,400,000	41.86%
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	12,900,000	5,400,000	100.00%
5.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	8,451,700	8,451,700	100.00%
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	8,451,700	8,451,700	100.00%
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	8,451,700	8,451,700	100.00%
6.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	4,000,000	4,000,000	100.00%
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4,000,000	4,000,000	0%
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-	-	0%
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	-	-	0%
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	-	-	100.00%

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Kantor Kecamatan Kabupaten Rembang sebagai SKPD yang mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas umum pemerintahan dan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah mempunyai fungsi pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pengkoordinasian pemeliharaan kegiatan dan fasilitas pelayanan umum, pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan, pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan, evaluasi dan pelaporan bidang tugas umum pemerintahan, dan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati, pelaksanaan kesekretariatan kecamatan, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk memberikan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada masyarakat. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien mungkin .

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Kantor Kecamatan Bulu dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan kategori (**Baik**). Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut :

1. Sisa anggaran antara anggaran yang ditetapkan dalam APBD sesuai dengan DPA dan DPPA OPD Kecamatan Bulu Tahun Anggaran 2023 sebesar **Rp1.873.879.592,-** dengan realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar **Rp1.793.654.994,-** atau sebesar 95,72 % dan sisa anggaran adalah sebesar **Rp80.224.598,-** atau 4,28 %
2. Permasalahan yang dapat mempengaruhi pencapaian kinerja pengelolaan keuangan dan kinerja pencapaian target Program dan Kegiatan pada tahun anggaran 2023 antara lain:
 - a. Adanya refocusing anggaran yang memangkas sejumlah pagu anggaran.
 - b. Belum adanya koordinasi secara maksimal beberapa kegiatan yang menjadi prioritas dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Daerah.

- c. Perencanaan Anggaran yang berbasis kinerja yang belum sempurna karena keterbatasan kemampuan APBD Kabupaten Rembang.
- d. Belum optimalnya koordinasi intern OPD dalam melaksanakan tahapan Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan dan Pelaporan sehingga berpengaruh terhadap pencapaian target kinerja dari Program dan Kegiatan yang telah ditentukan.

4.2 REKOMENDASI

Strategi yang dilaksanakan dalam menghadapi permasalahan tersebut adalah :

1. Mengevaluasi Perencanaan
2. Melaksanakan bintek kemampuan dasar pegawai
3. Mensosialisasikan visi dan misi daerah dan OPD
4. Meningkatkan kekompakan dan koordinasi internal kecamatan
5. Menjaga stabilitas kinerja di kecamatan

Demikian laporan kinerja instansi Kantor Kecamatan Bulu Tahun 2023 ini. Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut di atas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Kantor Kecamatan Bulu untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang.

Rembang, 22 Februari 2024
Camat Bulu



MOCHAMAD SOLEH SE MM

Pembina

NIP. 19700505 199003 1008